

KONTRIBUSI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nanda Kuswandari¹, Pingkan Salsa Hadiansyah², Tina Puri Andini³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: nandakuswandari17@gmail.com¹, pingkansalsaaa@gmail.com², tinapuria@gmail.com³

Abstract

Islamic accounting is a financial recording and reporting system based on Islamic principles, such as fairness, transparency, and responsibility (accountability). This article aims to discuss the urgency of implementing Islamic accounting in Islamic financial institutions, both in order to fulfill the interests of stakeholders and in maintaining operational harmony with Islamic values. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through literature studies. Based on the results of the analysis, it is known that the application of sharia accounting is able to improve information disclosure in financial statements, build public trust, and ensure that financial management runs according to sharia principles. This finding is expected to be a reference for Islamic financial institutions in designing and implementing accounting systems that are more effective and in accordance with sharia provisions.

Keyword: Accountability, Islamic Financial Institutions, Transparency

Abstrak

Akuntansi syariah merupakan suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab (akuntabilitas). Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi penerapan akuntansi syariah di dalam lembaga keuangan syariah, baik dalam rangka memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan maupun dalam menjaga keselarasan operasional dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penerapan akuntansi syariah mampu meningkatkan keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, membangun kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan menerapkan sistem akuntansi yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Lembaga Keuangan Syariah, Transparansi

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan aset, tetapi juga tuntutan untuk memastikan seluruh operasionalnya sesuai prinsip syariah. Akuntansi syariah muncul sebagai sistem krusial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga penjaga integritas transaksi melalui prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Ervanni et al., 2024). Prinsip ini menjadi pembeda utama dari sistem akuntansi konvensional, yang cenderung berorientasi pada laba tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan etika Islam.

Transparansi dalam laporan keuangan syariah merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan publik, terutama terkait pengelolaan dana masyarakat yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Studi menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah meningkatkan akurasi pengungkapan informasi, termasuk alokasi zakat dan bagi hasil, sehingga mendorong akuntabilitas lembaga keuangan syariah kepada pemangku kepentingan (Sagala et al., 2025). Namun, tantangan seperti variasi interpretasi fatwa syariah, kurangnya SDM kompeten, dan ketidakharmonisan standar akuntansi global masih menghambat optimalisasi peran sistem ini.

Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada implementasi standar, mekanisme pengawasan, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, pembahasan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola keuangan syariah yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode studi pustaka dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai referensi yang relevan dan mendalam guna memperkaya dasar teoritis dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengkaji berbagai sumber informasi seperti artikel dalam jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta media lainnya yang dapat dipercaya sebagai bahan acuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang dibahas, sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang logis dan berdasarkan landasan ilmiah yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memegang peranan penting dalam memastikan integritas dan kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan adanya transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) atau maysir (Ervanni et al., 2024). Oleh karena itu Tujuan utama akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam.

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan pelaporan lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan berpedoman pada standar yang telah disusun secara sistematis oleh DSN-MUI, lembaga keuangan syariah dapat menghindari berbagai praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). Selain itu, penerapan standar ini juga menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat

dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas dan kepatuhan lembaga terhadap nilai-nilai Islam.

Akuntansi syariah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kelangsungan operasional lembaga keuangan Islam, karena tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas, transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Berbeda dengan sistem akuntansi konvensional yang umumnya berorientasi pada pencapaian laba semata, akuntansi syariah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial, yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Landasan normatif akuntansi syariah berasal dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaidah fikih muamalah, yang secara tegas mengatur larangan terhadap praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan transaksi yang mengandung unsur penipuan atau spekulasi berlebihan (maysir). Salah satu karakteristik khas dalam praktik akuntansi syariah adalah kewajiban untuk mencatat dan melaporkan dana zakat secara transparan, sebagai wujud komitmen lembaga keuangan syariah dalam memenuhi aspek tanggung jawab sosial kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan legitimasi operasional lembaga tersebut dalam perspektif Syariah (Firdaus and Hidayat 2024)

Peningkatan Tranparansi Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam ekonomi Islam, transparansi adalah landasan utama yang mendorong para pelaku ekonomi untuk senantiasa jujur dan akurat dalam menyajikan laporan aset dan pendapatan mereka. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan ketersediaan informasi di setiap lini kegiatan ekonomi, semuanya harus selaras dengan kaidah Islam. Dengan adanya keterbukaan ini, pelaku ekonomi didorong untuk menyajikan laporan yang jelas, tepat, dan detail mengenai seluruh aset, pendapatan, pengeluaran, serta bagaimana mereka menjalankan bisnis. Tak hanya itu, transparansi juga berarti berbagi informasi penting dengan para pihak terkait, mulai dari pemegang saham, investor, pelanggan, hingga masyarakat umum.

Transparansi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aspek krusial:

1. Pelaporan Keuangan

Pelaku ekonomi Muslim diharapkan menyusun laporan keuangan yang benar dan terpercaya, yang secara tepat menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan aliran kas mereka. Laporan ini harus patuh pada prinsip akuntansi syariah dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Pembukaan Informasi

Transparansi dalam konteks ini mewajibkan pengungkapan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ini meliputi detail mengenai struktur kepemilikan, metode pengelolaan risiko, serta kebijakan sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh entitas atau lembaga ekonomi Islam.

3. Pemantauan dan Pemeriksaan

Aspek transparansi juga meliputi pengawasan dan audit yang ketat terhadap segala aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan. Adanya pengawasan dan audit yang independen sangat membantu dalam menjaga integritas laporan keuangan dan praktik bisnis yang dijalankan. (Putri 2019).

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Akuntabilitas dalam aspek keuangan merujuk pada kewajiban suatu entitas, khususnya perusahaan, untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana serta aset kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ini menuntut penyajian laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dimengerti serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut menyusun laporan keuangan yang menggambarkan secara transparan alur penggunaan dana dan aset yang dimiliki. Laporan tersebut sebaiknya mencakup data mengenai pendapatan, pengeluaran, aset yang dikuasai, kewajiban yang dimiliki, serta saldo kas atau dana yang tersedia (Abdullah and NUGRAHA 2020)

Penerapan akuntabilitas keuangan memungkinkan perusahaan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana dan aset berjalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, seperti pemilik usaha, investor, kreditur, dan instansi pemerintah. Selain itu, keberadaan laporan keuangan yang disusun secara transparan dan akurat turut memberikan dasar yang kuat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis terkait keberlanjutan dan arah perusahaan.

Selain berperan dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas juga memiliki peran strategis dalam menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya praktik negatif, seperti penyelewengan dana maupun manipulasi informasi keuangan (Darwis, 2013).

Prinsip-Prinsip yang Diterapkan dalam Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Asep Saepul Hamdi dan Komari (2022), dalam praktik perbankan syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah, terdapat sejumlah bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Larangan ini mencakup transaksi yang mengandung unsur-unsur seperti *maghrib*, *ghisy*, *najasy*, *ihtikar*, *tadlis*, *ghabn*, serta bentuk transaksi tidak etis lainnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Lucky Nugroho (2023) mengemukakan bahwa keuangan syariah didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, seperti larangan terhadap *riba*, *maysir*, dan *gharar*, penerapan keadilan dalam setiap transaksi, pembagian keuntungan dan risiko, penggunaan aset riil sebagai dasar transaksi, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum syariah.

Tantangan dalam Mewujudkan Tranparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Syariah

Tantangan dapat dipahami sebagai pemicu semangat dalam mencapai tujuan tertentu. Ia berperan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menyelesaikan

permasalahan dan bekerja lebih keras demi meraih hasil yang diinginkan. penerapan akuntansi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan upaya standardisasi dan penerapan sistem yang konsisten di berbagai negara. Berikut adalah beberapa tantangan nya:

1. Pentingnya penguatan struktur kelembagaan

Struktur kelembagaan pada Lembaga Keuangan Syariah masih belum menunjukkan tingkat efisiensi dan daya saing yang optimal, sehingga belum mencapai kematangan kelembagaan yang ideal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi pemanfaatan teknologi yang masih terbatas, akses terhadap permodalan yang belum memadai, jangkauan jaringan operasional yang sempit, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia di berbagai lini.

2. Minimnya edukasi dan promosi

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah menjadi hambatan tersendiri. Tantangan ini tidak hanya menyangkut bagaimana mengenalkan lembaga tersebut kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat.

3. Terbatasnya Jangkauan LKS

Keberadaan kantor Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia masih tergolong minim jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Ketimpangan ini sangat terlihat khususnya di wilayah pedesaan, di mana masyarakat lebih mudah menemukan layanan keuangan konvensional dibandingkan dengan yang berbasis syariah.

4. Rendahnya kualitas SDM

SDM yang memahami prinsip syariah secara mendalam masih langka. Banyak pegawai LKS berasal dari latar belakang konvensional dan belum kompeten dalam fiqh muamalah, sehingga berdampak pada kualitas layanan.

5. Keterbatasan Modal

Untuk mendukung pertumbuhan dan perluasan usaha, Lembaga Keuangan Syariah perlu melakukan penguatan modal. Tambahan modal dari pemegang saham atau pemangku kepentingan diperlukan agar kapasitas dalam mengambil risiko (risk-taking capacity) meningkat. Besaran modal yang dimiliki secara langsung mempengaruhi kemampuan lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha serta mendanai aktivitas ekonomi lainnya.

KESIMPULAN

Akuntansi syariah sangat penting bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Islam. Sistem ini meningkatkan keterbukaan informasi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pengelolaan

keuangan yang syariah. Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan fikih muamalah yang melarang riba, *gharar*, dan *maysir*. Transparansi dalam ekonomi Islam menekankan kejujuran, akurasi pelaporan, dan keterbukaan informasi, dengan aspek penting seperti pelaporan keuangan terpercaya, pengungkapan informasi relevan, serta pemantauan dan pemeriksaan ketat. Akuntabilitas keuangan menuntut LKS menyajikan laporan yang akurat dan transparan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Namun, tantangan seperti standardisasi, kualitas SDM, keterbatasan modal, jangkauan operasional, dan minimnya edukasi masih menghambat optimalisasi akuntansi syariah di LKS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, Yusuf, and AA WILLY NUGRAHA. 2020. "IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS BERDASARKAN PADA PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2): 77–88.
2. Firdaus, Rayyan, and Rayyan Hidayat. 2024. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM IMPLEMENTATION OF SHARIAH ACCOUNTING IN IMPROVING FINANCIAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN ISLAMIC." : 9152–55.
3. Kamal, Mustofa, Ahmad Sagala, and Kata Kunci. 2025. "Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah." 8(1): 307–17.
4. Khikmatin, A., & Setianingsih, P. (2021). Analisis peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional di Indonesia. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 49-62.
5. Nugroho, L. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah.
6. Octaviar Wilmar Ervanni, D. A. (2024). Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 407.
7. Putri, Meidya. 2019. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Islam." : 6–60. https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas_dan_transparansi_dalam_Islam_BAB_II_pdf.
8. Saepul Hamdi, A., & Komaria. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial. *Islahul Iqtishadi*, 1(2), 150–165.